



MANUAL INDIKATOR KINERJA 2024



Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan

Kata Pengantar

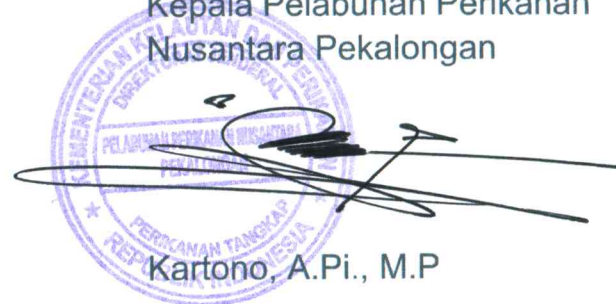
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian dan pengukuran, pengumpulan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPN Pekalongan) merupakan alat untuk mengukur capaian kinerja instansi pemerintah. Adanya dokumen Manual IKU digunakan untuk memastikan capaian kinerja memenuhi kriteria *specific, measurable, agreeable, realistic, time-bounded*, dan *continuously improved (SMART-C)*.

Kami menyadari bahwa Dokumen Manual IKU PPN Pekalongan 2024 ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu segala kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Manual IKU PPN Pekalongan 2024 ini dapat menjadi acuan dalam monitoring capaian kinerja organisasi. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi Manual IKU PPN Pekalongan 2024.

Pekalongan, 10 Januari 2024

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Pekalongan



Kartono, A.Pi., M.P

1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan



Sasaran Kegiatan	: Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
Nama IKU	: Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
Definisi	: <ul style="list-style-type: none">• Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.• Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan non Sumber Daya Alam (SDA) diantaranya pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, pendapatan jasa layanan (BLU) dan hak negara lainnya (TGR dan denda tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi)
Formula Perhitungan	: Merupakan nilai PNBP non SDA dari sektor PT di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Keterangan: Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW I + TW II; Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III; Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV
Satuan	: Juta Rupiah
Tingkat Validitas	: Output Kendali Rendah
Sumber Data	: Bendahara Penerimaan
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Tahunan
Metode Cascading	: Buat Baru
Target	: 1.013,27

2. Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan



Sasaran Kegiatan	:	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan Meningkat
Nama IKU	:	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
Definisi	:	Jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) di seluruh provinsi di Indonesia dalam bentuk basah.
Formula Perhitungan	:	<div data-bbox="555 571 1184 856">$Prod_{\text{Perikanan Tangkap}} = Prod_{PTL} + Prod_{PTPD}$<p><u>Keterangan:</u> <u>Prod_{PTL}</u> = <u>Produksi Perikanan Tangkap Laut</u> <u>Prod_{PTPD}</u> = <u>Produksi Perikanan Tangkap Perairan Darat</u></p></div> <div data-bbox="1210 664 1821 863"><p>Keterangan: Nilai TW I = capaian TW I Nilai TW II = capaian TW I + TW II Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV</p></div>
Satuan	:	Ton
Tingkat Validitas	:	Outcome
Sumber Data	:	Rekap Data Landing
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	13.119

3. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pekalongan



Sasaran Kegiatan	: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan yang berdaya saing
Nama IKU	: Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pekalongan
Definisi	: <ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan. Fungsi perusahaan fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan perikanan. Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNBP yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa laha/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisis atau evaluasi permohonan perusahaan.
Formula Perhitungan	: <p>Indikator I : $\frac{\text{Hasil Analisis Kesesuaian Permohonan Perusahaan terhadap usulan perusahaan baru/perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi}}{\text{Total jumlah usulan perusahaan yang masuk di (nama satker)}} \times 80\%$</p> <p>Indikator II : Ruang lingkup pelayanan perusahaan yang terstandarisasi (SOP/ISO/Standar Pelaksanaan Lainnya) = 20 %</p> <p><u>Persentase Perusahaan = Indikator I + Indikator 2</u></p>
Satuan	: Persen
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: Hasil Analisis Kesesuaian Permohonan Perusahaan
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Tahunan
Metode Cascading	: Buat Baru
Target	: 100

4. Tingkat Kinerja PPN Pekalongan



Sasaran Kegiatan : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan yang berdaya saing

Nama IKU : Tingkat Kinerja PPN Pekalongan

Definisi : Merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri.

Formula Perhitungan :

$$NK = \frac{\text{Bobot (A)} \times \text{Skala (S)}}{4}$$

Keterangan :

1. Sangat baik jika NK = (86 - 100)
2. Baik jika NK = (66 - 85)
3. Sedang jika NK : (46- 65)
4. Kurang jika NK = (0 - 45)

Parameter penilaian meliputi:
Administrasi dan Sistem Informasi (9 parameter), fasilitas pelabuhan perikanan (6 parameter), pelayanan publik (9 parameter), investasi dan industri (3 parameter).

Keterangan:

Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW II; Nilai TW III = capaian TW III; Nilai TW IV = capaian TW IV

Satuan : Nilai Polaritasi : Maximize

Tingkat Validitas : Output kendali rendah Periode Pelaporan : Triwulanan

Sumber Data : Aplikasi PIPP Metode Cascading : Buat Baru

Pola Perhitungan : Rata-rata Target : 84

5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan



Sasaran Kegiatan	: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan yang berdaya saing
Nama IKU	: Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
Definisi	: Merupakan indikator yang menunjukkan: <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%)2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%)3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%)
Formula Perhitungan	: <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan = jumlah persetujuan berlayar / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 (x1)2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan yang diterbitkan = jumlah kapal yang diterbitkan STBLK / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 (x2)3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan = 100 - [(jumlah permintaan verifikasi SHTI/ jumlah SHTI yang diterbitkan) x 100]..... (x3) <p>Tingkat Pelayanan = x1 + x2 + x3</p>
Satuan	: Persen
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: Pelayanan Kesyahbandaran
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Tahunan
Metode Cascading	: Buat Baru
Target	: 55

6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan



Sasaran Kegiatan	:	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan yang optimal
Nama IKU	:	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
Definisi	:	Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Pengembangan fasilitas eksisting (ha)}}{\text{Luas pelabuhan perikanan sesuai masterplan (ha)}} \times 100\%$
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah
Sumber Data	:	Tim Kerja TKPU
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	80

8. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan



Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Pekalongan
Nama IKU	:	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan
Definisi	:	Merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh (nama satker)
Formula Perhitungan	:	Jumlah kapal yang diterbitkan dokumen kapal perikanannya (sertifikat kelaikan kapal) oleh (nama satker) Keterangan: Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW I + TW II; Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III; Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV
Satuan	:	Kapal
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Aplikasi Sicefi
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	268

9. Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Pelindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan



Sasaran Kegiatan	: Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pekalongan
Nama IKU	: Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Pelindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan
Definisi	: Merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan serta yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-PKL / PKL dan sudah tersertifikasi di PPN Pekalongan}}{\text{Jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-PKL / PKL di (Nama Satker)}} \times 100\%$
Satuan	: Persen
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: Tim Kerja Kesyahbandaran
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Tahunan
Metode Cascading	: Buat Baru
Target	: 6

10. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (yang telah dinilai WBK)



Sasaran Kegiatan	: Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Pekalongan
Nama IKU	: Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (yang telah dinilai WBK)
Definisi	: Merupakan penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK di (nama satker) yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik
Formula Perhitungan	: Merupakan indikator dari nilai hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mencakup 6 Area Pengungkit dan 2 Area Komponen Hasil serta mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Unit Kerja
Satuan	: Nilai
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: LKE
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Tahunan
Metode Cascading	: Buat Baru
Target	: 80

11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan



Sasaran Kegiatan	: Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Pekalongan
Nama IKU	: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
Definisi	: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan
Formula Perhitungan	: Merupakan indikator dari nilai hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mencakup 6 Area Pengungkit dan 2 Area Komponen Hasil serta mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Unit Kerja.
Satuan	: Persen
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: Laporan Hasil Pengawasan Irjen
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Triwulanan
Metode Cascading	: Buat Baru
Target	: 80

12. Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan



Sasaran Kegiatan	: Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Pekalongan
Nama IKU	: Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
Definisi	: Rekonsiliasi kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap adalah Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk Meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, Menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan Sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Terdapat 4 aspek penilaian diantaranya adalah Aspek Kepatuhan (Bobot 25%), Aspek Kesesuaian (Bobot 25%), Aspek Ketercapaian (Bobot 30%), dan Aspek Ketepatan (20%)
Formula Perhitungan	: Dihitung dari hasil penilaian atas implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen Kertas Kerja Rekonsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku
Satuan	: Nilai
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: Lembar Kerja Rekonsiliasi Kinerja
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Tahunan
Metode Cascading	: Buat Baru
Target	: 94

13. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan



Sasaran Kegiatan	: Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Pekalongan
Nama IKU	: Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
Definisi	: Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
Formula Perhitungan	: Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni : Kualifikasi (diukur dari riwayat Pendidikan); Kompetensi (diukur dari riwayat pengembangan kompetensi); Kinerja (diukur dari penilaian prestasi kerja PNS); dan Disiplin Pegawai (diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami).
Satuan	: Indeks
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: Ropeg KKP
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Semesteran
Metode Cascading	: Buat Baru
Target	: 84

14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan



Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Pekalongan
Nama IKU	:	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
Definisi	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Formula Perhitungan	:	Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: <ul style="list-style-type: none">• Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)• Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).• Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).• Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	LKE PBJ
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	80

15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan



Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Pekalongan
Nama IKU	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
Definisi	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Formula Perhitungan	:	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur: <ul style="list-style-type: none">• Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot 10%);• Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);• Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2019-2022 (bobot 20%);• Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);• Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	LKE BMN
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	80

16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan



Sasaran Kegiatan	: Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Pekalongan
Nama IKU	: Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
Definisi	: Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Formula Perhitungan	: Peraturan DJPB per-4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja K/L Menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi
Satuan	: Nilai
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Semesteran
Metode Cascading	: Buat Baru
Target	: 93,76

17. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan



Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Pekalongan
Nama IKU	:	Nilai Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
Definisi	:	Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya
Formula Perhitungan	:	Menggunakan PMK No.22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atsa Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, dengan bobot penilaian Capaian output 43,5%; Efisiensi 28,6%; Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan 18,2%; Penyerapan Anggaran 9,7%
Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Aplikasi SMART DJA Kemenkeu
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	86

18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan



Sasaran Kegiatan	: Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Pekalongan
Nama IKU	: Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
Definisi	: Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
Formula Perhitungan	: Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindaklanjut pengisian SKM di lingkup KKP
Satuan	: Indeks
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: Aplikasi SISUSAN KKP
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Triwulanan
Metode Cascading	: Buat Baru
Target	: 88,30